

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang saling terkait tidak terpisahkan. Pertumbuhan perekonomian suatu negara atau daerah regional membutuhkan pembangunan ekonomi yang tepat. Jika kebijakan dalam pembangunan perekonomiannya tidak tepat, pertumbuhan perekonomiannya akan lambat atau cenderung tidak tumbuh atau bahkan tumbuh negatif. Begitu juga sebaliknya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, tumbuh tinggi dan konstan, pembangunan ekonomi akan berjalan dengan cepat. Dalam penelitian terdahulu juga menyatakan hal yang sama bahwa keduanya berkaitan erat, dimana pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi (Permana, 2014).

Terdapat perbedaan diantara kedua terminologi pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun keduanya memiliki hubungan keterikatan yang kuat. Menurut (Arsyad, 1999) pembangunan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan riil perkapita suatu wilayah beserta adanya

perombakan dan perbaikan struktur ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diidentikkan dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tidak memperdulikan mengenai perubahan struktur ekonomi dan kenaikan jumlah penduduk.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya guna memacu pertumbuhan perekonomiannya melalui kegiatan perekonomian daerah, seperti pembentukan institusi baru, perbaikan tenaga kerja dan jasa, serta pembangunan industri alternatif. Kemudian juga membentuk suatu mitra kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru (Arsyad, 2010). Selain itu, pandangan lain (Siahaan, 2013) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses pertumbuhan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang. Sebab dalam kondisi laju pembangunan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan penduduknya, pendapatan riil per kapita juga meningkat.

Pembangunan perekonomian memiliki tujuan utama untuk merangsang pertumbuhan perekonomian dengan setinggi mungkin dan mengurangi angka tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan jumlah pengangguran (Bappeda DIY, 2012). Sejalan dengan pernyataan tersebut (Suparmoko, 1990) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan usaha guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terukur dari pendapatan total dan pendapatan perkapita. Lalu tujuan akhir pembangunan ekonomi tersebut adalah

untuk menaikkan produktivitas atau pertumbuhan perekonomian daerah regional yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan pendapatan nasionalnya.

Pembangunan daerah bisa dimaknai dari beberapa sudut pandang, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pertama pembangunan daerah dapat dilihat dari segi pembangunan sektoral, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan suatu daerah diawali dengan pembangunan dari berbagai sektoral. Kemudian yang kedua adalah dari segi pembangunan wilayah, maksudnya adalah untuk kegiatan perekonomian dan dijadikan sebagai pusat perekonomian, dilakukan dengan pembangunan wilayah perkotaan ataupun perdesaan. Lalu yang ketiga dapat dilihat dari segi pemerintahan, yaitu untuk membangun suatu daerah dilakukan dengan melaksanakan sistem pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Adanya berbagai sudut pandang tersebut mengakibatkan pemerintah daerah memiliki berbagai peran yang dapat diambil terkait dengan pembangunan daerahnya. Menurut (Arsyad, 2005) terdapat empat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Pertama adalah sebagai *entrepreneur*, yakni pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usahanya sendiri dengan menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah harus dapat mengelola aset-aset yang dimiliki agar lebih memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian yang kedua adalah sebagai koordinator, yaitu pemerintah daerah dapat menyusun strategi dan sasaran ekonomi dengan melibatkan lembaga pemerintah lainnya, pihak swasta, dan masyarakat. Ketiga

adalah sebagai fasilitator, yaitu pemerintah daerah dapat memperbaiki perilaku budaya masyarakat guna mempercepat pembangunan daerahnya. Lalu yang terakhir, keempat, adalah sebagai stimulator, maksudnya pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan atau penciptaan usaha dengan menarik perusahaan swasta agar masuk ke daerahnya dan juga menjaga agar perusahaan yang sudah ada tetap ada di daerahnya, salah satunya yaitu dengan pembangunan kawasan industri.

Terdapat berbagai teori pembangunan ekonomi daerah yang telah disampaikan oleh berbagai ekonom di masa lalu. Beberapa teori tersebut diantaranya adalah Teori Ekonomi Neoklasik, Teori Basis Ekonomi, Teori Tempat Sentral, Teori Kausatif Kumulatif, Teori Lokasi, dan Teori Model Daya Tarik (Arsyad, 1999). Dalam penelitian ini teori yang secara langsung akan diterapkan adalah Teori Basis Ekonomi. Meskipun begitu, teori yang lain tetap akan berkaitan secara tidak langsung, yang mana pada intinya sebagai dasar teori pembangunan ekonomi secara umum.

Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk daerah regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDB atau PDRB menggambarkan perekonomian suatu negara atau daerah regional mengalami pertumbuhan. Hal tersebut sependapat dengan (Arsyad, 2010) yang menyatakan bahwa perekonomian suatu wilayah dapat disebut mengalami pertumbuhan apabila PDRB riil juga mengalami peningkatan di wilayah tersebut. Sejalan dengan pernyataan tersebut, (Samuelson, 1995) menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi menandakan juga adanya peningkatan atau perluasan *Gross Domestic Bruto* (GDP), atau dalam istilah Bahasa Indonesia adalah PDB, dari suatu negara. Terdapat empat faktor penyebab pertumbuhan perekonomian suatu wilayah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja merupakan faktor yang sangat penting. Unsur lain seperti bahan mentah, teknologi, dan faktor produksi lain dapat dibeli, namun tanpa SDM yang berkualitas faktor produksi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan efektif.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Wilayah dengan SDA yang berlimpah memiliki keuntungan tersendiri. Sebab adanya SDA yang berlimpah akan mendukung pertumbuhan perekonomian. Namun tentunya SDA tersebut harus dapat dimanfaatkan secara tepat guna dengan kebijakan yang mendukung.

3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal dan investasi merupakan hal yang penting untuk percepatan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Namun hal tersebut memerlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi selama beberapa tahun lamanya.

4. Perubahan Teknologi dan Inovasi

Pertumbuhan ekonomi yang cepat membutuhkan penemuan-penemuan baru yang berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas produksi dengan terus melakukan perbaikan yang diperlukan.

Menurut (Sumitro, 1994), pertumbuhan ekonomi saling berikatan dengan proses pembangunan ekonomi, yang mana dapat diukur dengan perubahan hasil produksi dan pendapatan. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah berakibat pada perbedaan pertumbuhan ekonominya pula. Hal inilah yang membentuk suatu pola pertumbuhan oleh masing-masing daerah yang berakibat terbentuknya klasifikasi penggolongan daerah pada analisis Tipologi Klassen. Daerah yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang optimal dapat dikatakan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan telah berhasil. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sukirno, 1996), bahwa indikator tingkat keberhasilan perekonomian suatu daerah dapat dilihat atau diukur dari pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Pertumbuhan perekonomian daerah merupakan hasil dari perkembangan dan peningkatan ekonomi dari berbagai sektor yang ada di daerah tersebut. Sektor-sektor ekonomi tersebutlah yang menopang perekonomian daerahnya secara keseluruhan. Perekonomian daerah dengan sektor-sektor ekonomi tersebut dapat dilihat hubungannya melalui pengukuran beberapa alat analisis. Menurut (Arsyad, 2010), hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungannya, sebagai sektor yang menopang perkenomian daerahnya, dapat digambarkan oleh beberapa analisis yang digunakan untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi. Analisis tersebut antara lain adalah *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay*.

## **2.2 Konsep Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDB dan PDRB merupakan indikator yang penting untuk mengetahui kondisi perekonomian nasional maupun daerah regional dalam suatu periode tertentu. Pada hakikatnya PDB/PDRB memiliki konsep yang sama secara keseluruhan, hanya saja berada pada tingkat yang berbeda. Untuk tingkat nasional dapat diketahui melalui PDB, sedangkan perekonomian daerah regional tercermin dalam PDRB. Menurut (BPS DIY, 2022), regional dalam hal ini meliputi Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kemudian di dalam PDRB tersebut hanya menghitung transaksi ekonomi yang terjadi di suatu daerah regional, dengan tidak mempertimbangkan subjeknya, masyarakat daerah bersangkutan (residen) atau masyarakat luar daerah tersebut (non-residen).

Menurut (BPS DIY, 2021), PDRB/PDB merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah, baik regional atau nasional, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi tersebut dimiliki residen atau non-residen. Kemudian PDB/PDRB tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu, atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDB/PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDB/PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Kemudian tujuannya adalah untuk melihat pergeseran dan struktur perekonomian.

Sedangkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar, data PDB/PDRB yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2010. Lalu tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian antar suatu periode.

Menurut (BPS, 2021), terdapat tujuh belas kategori lapangan usaha dalam klasifikasi yang digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB menurut lapangan usaha yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam perhitungan PDB/PDRB (BPS, 2022). Secara konsep ketiganya akan menunjukkan hasil perhitungan akhir yang sama. Pendekatan tersebut antara lain yaitu,

1. Pendekatan Produksi

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)

2. Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

### 3. Pendekatan Pengeluaran

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

## 2.3 Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang lebih terhadap perekonomian daerahnya jika dibandingkan dengan sektor perekonomian yang lain. Kontribusi yang cukup besar di atas rata-rata membuat sektor ekonomi tersebut dapat menopang perekonomian di daerah yang bersangkutan. Kontribusi yang lebih tersebut diperoleh karena sektor unggulan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif (Sapriadi & Hasbiullah, 2015). Mengarahkan atau memfokuskan kebijakan ke sektor ekonomi unggulan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sebab sektor ekonomi unggulan memiliki *multiplier effect*, yang mana aktivitas perekonomian dari

sektor unggulan akan melibatkan atau mempengaruhi juga sektor-sektor ekonomi non-unggulan yang lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut (Widodo, 2006) menyampaikan bahwa sektor unggulan dapat dikatakan sebagai sektor yang memberikan dorongan bagi sektor ekonomi lainnya. Melalui input dari sektor lain yang digunakan sektor unggulan maupun output sektor unggulan yang dimanfaatkan sektor lainnya, sektor unggulan ini dapat menggerakkan perekonomian secara keseluruhan di daerah yang bersangkutan. Sehingga sektor unggulan merupakan konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, khususnya sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah. Seperti dalam (Arsyad, 1999) mengatakan bahwa dalam pembangunan daerah, kebijakan yang mendasari haruslah menekankan pada karakteristik dan kekhasan daerahnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Suatu sektor ekonomi dapat disebut sebagai sektor unggulan didasarkan pada kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Sektor ekonomi unggulan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah memiliki angka tenaga kerja yang besar, laju pertumbuhan sektor yang relatif tinggi, dan keterlibatannya antar sektor cukup besar. Selain itu sektor unggulan dapat dimaknai sebagai sektor ekonomi yang dapat menciptakan suatu nilai tambah (*value added*) (Sambodo, 2002). Sedangkan menurut (Muta'ali, 2015) terdapat beberapa kriteria agar suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor ekonomi unggulan, antara lain yaitu,

1. Memiliki laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya;
2. Memiliki kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi;
3. Memiliki tingkat keterkaitan antar sektor yang tinggi, baik keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*);
4. Memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi daripada sektor-sektor lainnya.

#### **2.4 Teori Basis Ekonomi**

Basis Ekonomi merupakan sektor ekonomi yang menjadi basis perekonomian dari suatu daerah. Basis disini dapat dimaknai sebagai sektor ekonomi yang mampu menjadi tumpuan bagi perekonomian daerah. Suatu sektor ekonomi dapat dikatakan menjadi sektor basis ketika sektor tersebut memiliki daya saing yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lainnya. Dengan begitu sektor basis memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor ke luar daerahnya. Pada hakikatnya dalam teori basis ekonomi ini ingin menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian suatu daerah bergantung pada aktivitas ekspor dari suatu sektor ekonomi di daerahnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran (Adisasmita, 2005), yang menyatakan bahwa sektor basis memiliki aktivitas ekonomi yang berorientasi kepada ekspor ke luar daerahnya. Sektor basis menjadi penggerak utama perekonomian di daerahnya. Hal tersebut disebabkan sektor basis memiliki

*multiplier effect*, yang mana aktivitas ekspornya akan memberikan dorongan bagi sektor-sektor non-basis lainnya.

Pendapat lain yang juga mendukung pernyataan tersebut disampaikan oleh (Glasson & Marshall, 2007), yang menyampaikan bahwa kunci utama pertumbuhan perekonomian daerah adalah performa ekspor. Hal tersebut menandakan bahwa sumber daya yang dimiliki suatu daerah, yang mana menjadi permintaan eksternal, menjadi sumber kekuatan perekonomian daerah sebagai pemacu pertumbuhan perekonomian daerah yang bersangkutan. Aktivitas ekspor akan membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan meningkatkan laju investasi daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu yang sangat dinamis ini, sektor basis juga mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Sesuai dengan pendapat (Priyarsono et al, 2007) bahwa, sektor basis/non-basis tidak bersifat statis, namun dinamis yang mana dapat meningkat, mengalami kemunduran, serta dapat bergeser ke sektor yang lain untuk setiap tahunnya. Faktor-faktor kemajuan sektor basis antara lain perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi, pendapatan daerah, teknologi, dan perkembangan prasarana ekonomi sosial. Sedangkan faktor-faktor kemundurannya antara lain adanya penurunan permintaan eksternal dan keterbatasan sumber daya.

Sektor basis dan non-basis pada suatu daerah dapat diketahui dengan suatu metode pengukuran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penentuan sektor basis/non-basis melalui pengukuran dengan metode langsung akan membutuhkan survey lapangan pada daerah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam penentuan sektor basis/non-basis menggunakan metode pengukuran tidak langsung dilakukan dengan menganalisis data sekunder, yaitu data PDB dan/atau PDRB (Bappeda DIY, 2012). Penentuan sektor basis/non-basis di dalam penelitian ini dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan menganalisis data PDB nasional dan PDRB Provinsi DI Yogyakarta.

## **2.5 Analisis *Location Quotient* (LQ)**

*Location Quotient* (LQ) merupakan alat analisis untuk menentukan sektor perekonomian basis/non-basis pada suatu perekonomian daerah. Konsep dasar dari analisis ini adalah dengan membandingkan antara rasio nilai indikator ekonomi (PDB/PDRB) suatu sektor di daerahnya dengan rasio nilai indikator ekonomi (PDB/PDRB) pada sektor yang sama di wilayah referensi, wilayah yang memiliki tingkatan lebih tinggi. (Imelia, 2006) menyampaikan bahwa dengan menggunakan LQ dapat diketahui tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan, yaitu dengan membandingkan kontribusinya dalam perekonomian daerahnya dibandingkan dengan kontribusi industri sejenis dalam perekonomian regional.

Pandangan lain oleh (Tarigan, 2005) juga sejalan dengan pernyataan tersebut, yaitu menerangkan bahwa LQ merupakan suatu alat analisis yang dipakai untuk mencari sektor unggulan dan non-unggulan di suatu daerah. Penentuan sektor unggulan/non-unggulan tersebut dilakukan dengan membandingkan besarnya peranan suatu sektor secara nasional, atau dalam lingkup wilayah administrasi yang lebih tinggi satu tingkat dari objek analisis.

Penentuan sektor basis dapat dilakukan dengan analisis LQ baik berupa *Static Location Quotient* (SLQ) maupun *Dynamic Location Quotient* (DLQ). DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ, yang mana telah memperhitungkan adanya laju pertumbuhan perekonomian dari daerah objek analisis. Sehingga perbedaannya adalah di dalam SLQ masih belum mempertimbangkan adanya laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Adapun perhitungan SLQ dapat ditentukan melalui rumus berikut:

$$SLQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

**Keterangan:**

$SLQ$  = Hasil nilai SLQ

$Si$  = PDRB sektor  $i$  tingkat regional (wilayah studi)

$S$  = PDRB total tingkat regional (wilayah studi)

$Ni$  = PDB sektor  $i$  tingkat nasional (wilayah referensi)

$N$  = PDB total tingkat nasional (wilayah referensi)

Sedangkan untuk perhitungan DLQ dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$DLQ = \left[ \frac{(1 + g_i)/(1 + g)}{(1 + G_i)/(1 + G)} \right]^t$$

**Keterangan:**

$DLQ$  = Hasil nilai DLQ

$g_i$  = Laju pertumbuhan sektor  $i$  tingkat regional (wilayah studi)

$g$  = Rata-rata laju pertumbuhan tingkat regional (wilayah studi)

$G_i$  = Laju pertumbuhan sektor  $i$  tingkat nasional (wilayah referensi)

$G$  = Rata-rata laju pertumbuhan tingkat nasional (wilayah referensi)

$t$  = Selisih tahun akhir dan tahun awal

Hasil dari perhitungan LQ tersebut dapat diinterpretasikan ke dalam tiga kelompok, antara lain:

- a) Jika  $LQ = 1$  menandakan bahwa kontribusi suatu sektor pada tingkat regional sama besarnya dengan kontribusi sektor yang sama pada tingkat nasional. Sektor pada kategori ini dapat mencukupi kebutuhan wilayahnya, namun belum bisa melakukan ekspor ke luar wilayah.
- b) Kemudian jika  $LQ < 1$  bermakna bahwa kontribusi suatu sektor pada tingkat regional lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama pada tingkat nasional. Sektor dengan kondisi tersebut belum dapat diekspor ke luar wilayah, hanya untuk dikonsumsi di dalam wilayahnya.
- c) Lalu yang terakhir jika  $LQ > 1$  berarti kontribusi suatu sektor pada tingkat regional lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama pada tingkat nasional. Sehingga sektor dalam klasifikasi ini mampu mencukupi kebutuhan dalam wilayahnya sendiri dan juga mampu melakukan ekspor ke luar wilayahnya. Sehingga sektor inilah yang disebut sebagai sektor basis.

## **2.6 Analisis *Shift-Share***

Analisis ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur atau pola perekonomian suatu daerah dalam jangka periode tertentu. Dengan analisis ini dapat diketahui suatu sektor perekonomian di suatu daerah mengalami kenaikan, stagnan, atau bahkan mengalami penurunan. Sehingga dengan melakukan analisis ini dapat diketahui sektor ekonomi apa saja yang mengalami kenaikan seiring dengan adanya suatu pergeseran keadaan perekonomian di suatu daerah. Dengan begitu arah kebijakan

perekonomiannya akan dapat difokuskan pada sektor tersebut, guna dapat menjadi penopang atau akselerator pertumbuhan perekonomian bagi daerah tersebut.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan seberapa besar kinerja atau produktivitas dari suatu sektor perekonomian di suatu daerah dengan cara membandingkan kinerja suatu sektor di daerah regional dengan wilayah yang lebih tinggi tingkatannya (Basuki & Gayatri, 2009). Jika dibandingkan dengan analisis LQ, penggunaan analisis *Shift Share* akan mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Sebab pada analisis Shift Share ini telah mengakomodasi penjelasan mengenai penyebab perubahan atas beberapa variabel (Tarigan, 2005).

Menurut (Arsyad, 2005) pada analisis *Shift Share* membagi analisis kinerja perekonomian menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh pertumbuhan nasional (*National Growth Effect / National Shares*)  
Menjelaskan mengenai pengaruh pertumbuhan perekonomian nasional, atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya, terhadap perekonomian daerah regional. Menunjukkan proporsi perubahan perekonomian daerah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan asumsi memiliki peningkatan yang sama sebesar perubahan ekonomi nasional.
2. Pengaruh bauran industri atau pergeseran proporsional (*Industry Mix Effect / Proportional Shift*)  
Menjelaskan proporsi pertumbuhan suatu sektor ekonomi di tingkat nasional dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional secara total. Sehingga menunjukkan apakah sektor ekonomi tersebut tumbuh diatas atau

dibawah rata-rata dari sektor-sektor lainnya secara nasional. Dalam hal ini pertumbuhan sektor ekonomi daerah regional dianggap meningkat sebesar pertumbuhan sektor ekonomi nasional.

3. Pengaruh keunggulan kompetitif atau pergeseran diferensial (*Regional Shares Effect / Differential Shift*)

Menggambarkan proporsi pertumbuhan suatu sektor di daerah regional dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional. Ketika pertumbuhan suatu sektor di daerah regional lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama secara nasional, daya saing sektor tersebut di daerah yang bersangkutan lebih tinggi dengan daerah regional lainnya pada sektor yang sama. Sehingga dengan komponen ini dapat ditunjukkan apakah suatu sektor di daerah tertentu memiliki keunggulan kompetitif terhadap sektor yang sama di daerah regional lainnya.

Perhitungan *Shift Share* dan komponennya dapat ditentukan melalui formula sebagai berikut:

a. *National Growth Effect*

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

b. *Industry Mix Effect / Proportional Shift*

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

c. *Regional Shares Effect / Differential Shift*

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

d. *Total Effect*

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

**Keterangan:**

$i$	= Sektor ekonomi objek analisis
$j$	= Daerah regional objek analisis atau wilayah studi
$n$	= Wilayah nasional atau wilayah referensi
$N_{ij}$	= Pertumbuhan sektor $i$ di daerah regional (wilayah studi)
$M_{ij}$	= Bauran Industri sektor $i$ di daerah regional (wilayah studi)
$C_{ij}$	= Keunggulan kompetitif sektor $i$ di daerah regional (wilayah studi)
$D_{ij}$	= Perubahan sektor $i$ di daerah regional (wilayah studi)
$E_{ij}$	= PDRB sektor $i$ di daerah regional (wilayah studi)
$r_{ij}$	= Laju pertumbuhan sektor $i$ di daerah regional (wilayah studi)
$r_{in}$	= Laju pertumbuhan sektor $i$ di daerah nasional (wilayah referensi)
$r_n$	= Laju pertumbuhan ekonomi secara nasional (wilayah referensi)

Interpretasi dari hasil perhitungan tersebut antara lain:

- Ketika *National Growth Effect* positif ( $N_{ij} > 0$ ), pertumbuhan sektor  $i$  di daerah regional (wilayah studi) secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, berlaku juga sebaliknya.
- Ketika *Industry Mix Effect / Proportional Shift* positif ( $M_{ij} > 0$ ), pertumbuhan sektor  $i$  di daerah regional (wilayah studi) cepat.
- Ketika *Regional Shares Effect / Differential Shift* positif ( $C_{ij} > 0$ ), sektor  $i$  di daerah regional (wilayah studi) dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan daerah regional lainnya.
- Ketika nilai *Shift Share* positif ( $D_{ij} > 0$ ), sektor  $i$  di daerah regional (wilayah studi) mengalami penambahan nilai absolut atau peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Pada analisis ini juga dikenal terminologi *shift neto* ( $SN_{ij}$ ). *Shift neto* merupakan penjumlahan dari komponen *Industry Mix Effect / Proportional Shift* ( $M_{ij}$ ) dengan *Regional Shares Effect / Differential Shift* ( $C_{ij}$ ). Sehingga dapat dirumuskan seperti berikut:

$$SN_{ij} = M_{ij} + C_{ij}$$

**Keterangan:**

$SN_{ij}$  = Nilai *shift neto* sektor  $i$  di daerah regional (wilayah studi)

$M_{ij}$  = Bauran Industri sektor  $i$  di daerah regional (wilayah studi)

$C_{ij}$  = Keunggulan kompetitif sektor  $i$  di daerah regional (wilayah studi)

Interpretasi dari perhitungan tersebut adalah jika hasil nilai *shift neto* positif ( $SN_{ij} > 0$ ), pertumbuhan sektor  $i$  pada daerah regional (wilayah studi) termasuk ke dalam kelompok progresif atau mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat nasional (wilayah referensi). Sedangkan jika hasil nilai *shift neto* negatif ( $SN_{ij} < 0$ ), pertumbuhan sektor  $i$  pada daerah regional (wilayah studi) lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional (wilayah referensi).

## 2.7 Analisis Tipologi Klassen

*Klassen Typology* merupakan suatu analisis ekonomi yang membagi sektor-sektor perekonomian menjadi empat klasifikasi (empat kuadran). Klasifikasi tersebut ditentukan dari dua indikator ekonomi utama, yaitu presentase kontribusi sektor ekonomi sebagai sumbu horizontal dan presentase laju pertumbuhan sektor ekonomi sebagai sumbu vertikal. Klasifikasi tersebut

digunakan untuk mengetahui struktur dan pola pertumbuhan perekonomian daerahnya melalui sektor-sektor ekonomi yang telah terklasifikasi ke dalam empat kuadran tersebut (Imelia, 2006). Dengan mengetahui klasifikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan perekonomian suatu daerah di masa mendatang. Sehingga dapat digunakan sebagai pandangan dan pertimbangan dalam penerapan kebijakan pembangunan perekonomian daerah (Basuki & Gayatri, 2009). Berikut merupakan empat klasifikasi analisis Tipologi Klassen (Bappeda DIY, 2012):

- 1) Sektor Prima atau Unggulan
- 2) Sektor Potensial
- 3) Sektor Berkembang
- 4) Sektor Terbelakang

Perhitungan presentase kontribusi sektor ekonomi dapat ditentukan dengan menggunakan perhitungan dalam *SLQ* sesuai dengan yang ada dibahas sebelumnya, atau dapat juga dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi sektor} = \left( \frac{E_{ij}}{E_j} \times 100 \right) \text{ atau } \left( \frac{E_{in}}{E_n} \times 100 \right)$$

**Keterangan:**

- $i$  = Sektor  $i$
- $j$  = Daerah regional
- $n$  = Daerah nasional
- $E_{ij}$  = PDRB sektor  $i$  daerah  $j$
- $E_j$  = PDRB total daerah  $j$
- $E_{in}$  = PDB sektor  $i$  daerah  $n$
- $E_n$  = PDB total daerah  $n$

Sedangkan perhitungan presentase laju pertumbuhan sektor ekonomi dapat ditentukan dengan rumus berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \left[ \left( \frac{E_{i,j,t}}{E_{i,j,t0}} \right) - 1 \right] \times 100 \text{ atau } \left[ \left( \frac{E_{i,n,t}}{E_{i,n,t0}} \right) - 1 \right] \times 100$$

**Keterangan:**

$i$  = Sektor  $i$

$j$  = Daerah regional

$n$  = Daerah nasional

$E_{i,j,t}$  = PDRB sektor  $i$  daerah  $j$  tahun akhir

$E_{i,j,t0}$  = PDRB sektor  $i$  daerah  $j$  tahun awal

$E_{i,n,t}$  = PDB sektor  $i$  daerah  $n$  tahun akhir

$E_{i,n,t0}$  = PDB sektor  $i$  daerah  $n$  tahun awal

## 2.8 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis ini dapat dikatakan sebagai bentuk sederhana dari analisis *Shift Share*. Pada dasarnya analisis ini memiliki tujuan yang serupa dengan analisis perekonomian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang sekiranya memiliki prospek yang bagus pada suatu periode. Sejalan dengan hal tersebut (Yusuf, 1999) mengemukakan bahwa analisis model rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor perekonomian di suatu daerah itu potensial yang mana didasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonominya. Yaitu dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dibandingkan pada wilayah referensi. Laju pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari nilai perubahan pendapatan dari sektor-sektor tersebut.

Pada Model Rasio Pertumbuhan ini terdapat dua rasio analisis, yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi ( $RP_R$ ) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi ( $RP_S$ ). Penjelasan lebih detail sebagai berikut:

#### 1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi ( $RP_R$ )

Merupakan perbandingan antara pertumbuhan sektoral ekonomi wilayah referensi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah referensi secara total. Penghitungan rasio ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$RP_R = \frac{\left[ \frac{(E_{i,n,t2} - E_{i,n,t1})}{E_{i,n,t1}} \right]}{\left[ \frac{(E_{n,t2} - E_{n,t1})}{E_{n,t1}} \right]}$$

#### **Keterangan:**

$RP_R$  = Nilai rasio pertumbuhan sektor  $i$  tingkat nasional (wilayah referensi).

$E_{i,n,t2}$  = Nilai PDB sektor  $i$  tingkat nasional di akhir periode analisis.

$E_{i,n,t1}$  = Nilai PDB sektor  $i$  tingkat nasional di awal periode analisis.

$E_{n,t2}$  = Nilai total PDB tingkat nasional di akhir periode analisis.

$E_{n,t1}$  = Nilai total PDB tingkat nasional di awal periode analisis.

Hasil perhitungan tersebut memiliki interpretasi seperti berikut:

- a. Jika nilai ( $RP_R > 1$ ), pertumbuhan sektoral pada wilayah referensi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara total pada wilayah referensi yang sama.
- b. Jika nilai ( $RP_R < 1$ ), pertumbuhan sektoral pada wilayah referensi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara total pada wilayah referensi yang sama.

#### 2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi ( $RP_S$ )

Merupakan perbandingan antara pertumbuhan sektoral ekonomi wilayah studi dengan pertumbuhan sektoral ekonomi wilayah referensi. Penghitungan rasio ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$RP_s = \frac{\left[ \frac{(E_{i,j,t2} - E_{i,j,t1})}{E_{i,j,t1}} \right]}{\left[ \frac{(E_{i,n,t2} - E_{i,n,t1})}{E_{i,n,t1}} \right]}$$

**Keterangan:**

$RP_s$  = Nilai rasio pertumbuhan sektor  $i$  pada tingkat regional (wilayah studi).

$E_{i,j,t2}$  = Nilai PDRB sektor  $i$  tingkat regional di akhir periode analisis.

$E_{i,j,t1}$  = Nilai PDRB sektor  $i$  tingkat regional di awal periode analisis.

$E_{i,n,t2}$  = Nilai PDB sektor  $i$  tingkat nasional di akhir periode analisis.

$E_{i,n,t1}$  = Nilai PDB sektor  $i$  tingkat nasional di awal periode analisis.

Hasil perhitungan tersebut memiliki interpretasi seperti berikut:

- a. Jika nilai ( $RP_s > 1$ ), pertumbuhan sektoral pada tingkat regional (wilayah studi) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat nasional (wilayah referensi).
- b. Jika nilai ( $RP_s < 1$ ), pertumbuhan sektoral pada tingkat regional (wilayah studi) lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat nasional (wilayah referensi).

Hasil dari perhitungan kedua rasio analisis tersebut dapat mengelompokkan sektor-sektor ekonomi menjadi empat kelompok, antara lain yaitu:

- 1) Kategori 1 yaitu ( $RP_R > 1$ ) dan ( $RP_s > 1$ ), menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi baik di tingkat regional (wilayah studi) maupun nasional (wilayah referensi).

- 2) Kategori 2 yaitu ( $RP_R > 1$ ) dan ( $RP_S < 1$ ), menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang dominan secara nasional (wilayah referensi), namun pada tingkat regional (wilayah studi) sektor tersebut pertumbuhannya masih lebih rendah.
- 3) Kategori 3 yaitu ( $RP_R < 1$ ) dan ( $RP_S > 1$ ), menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang dominan pada tingkat regional (wilayah studi), namun secara nasional (wilayah referensi) sektor tersebut pertumbuhannya masih lebih rendah.
- 4) Kategori 4 yaitu ( $RP_R < 1$ ) dan ( $RP_S < 1$ ), menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah baik di tingkat regional (wilayah studi) maupun nasional (wilayah referensi).

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan tema yang menjadi tema penelitian dalam KTTA ini:

Penelitian oleh Dio Astya Firmansyah, Billie Aldero Surya Saputra, dan Aden Muflih Khaitami tahun 2021 dengan judul “Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menghadapi Pandemi Covid- 19” membahas mengenai strategi apa yang tepat untuk mengembangkan perekonomian DIY pada masa pandemi Covid – 19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat sektor ekonomi unggulan di DIY dan mencari tingkat keterkaitan antar sektor ekonomi. Analisis yang digunakan antara lain adalah analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*,

*input-output*, dan analisis SWOT. Untuk mendukung analisis tersebut digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Nasional dan Provinsi DIY. Data tersebut antara lain adalah PDRB Provinsi DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Triwulan I-III tahun 2020 dan PDB Nasional ADHK Triwulan I-III tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa sektor yang menjadi sektor unggulan pada Provinsi DIY pada tahun 2020, antara lain yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Skripsi berjudul “Analisis Sektor Potensial dan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2007-2012)” disusun oleh Andreas Andy Permana untuk menganalisis produktivitas kerja tiap sektor terhadap perekonomian daerah di Provinsi DIY. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis ekonomi apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY, menganalisis produktivitas kerja tiap sektor terhadap perekonomian daerah di Provinsi DIY dan menentukan pembagian tipologi daerah di Provinsi DIY. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan analisis LQ, *Shift-Share*, dan Tipologi Wilayah. Data utama yang digunakan adalah PDB Nasional dan PDRB pada tingkat daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota, tahun 2007 hingga 2012. Hasil penelitian ini, berdasarkan Tipologi Klassen Kota Yogyakarta termasuk dalam Tipologi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh. Sedangkan Kabupaten Sleman termasuk dalam Tipologi Daerah Berkembang

Cepat. Tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul termasuk dalam Tipologi Daerah Relatif Tertinggal.

Penelitian oleh Mahmud Basuki dan Febri Nugroho Mujiraharjo dengan berjudul “Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode *Shift Share* dan *Location Quotient*” bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Sleman agar pemerintah daerah terfokus dalam mengembangkan daerahnya. Alat yang digunakan untuk menganalisis agar dicapai tujuan tersebut adalah analisis *Shift-Share* dan LQ. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang disediakan situs BPS. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman ADHK tahun dasar 2010 periode tahun 2011 – 2015 dan PDRB DIY atas tahun dasar 2010 periode tahun 2011 – 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sektor unggulan Kabupaten Sleman antara lain sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estate, dan sektor jasa perusahaan.

Jurnal ilmiah bernama Jurnal Ekonomi Modernisasi dengan judul “*Shift Share analysis* Indonesia masa pandemi Covid-19” yang disusun oleh Lucky Rachmawati, Hendry Cahyono, Jaka Nugraha, Ladi Watjuba, Nurul Hanifa, membahas mengenai analisis pergeseran sektor ekonomi akibat pandemi virus Corona. Analisis perekonomian tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan sektor ekonomi yang mampu bersaing guna mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional. Objek penelitian menggunakan lima sampel provinsi di Indonesia, yakni diambil dari lima provinsi dengan

kontribusi terbesar dalam PDB Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan alat analisis *Shift-Share*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS, yaitu PDRB dari lima provinsi tersebut pada triwulan keempat tahun 2019 dan triwulan kedua tahun 2020. Hasil analisis adalah bahwa terdapat beberapa sektor yang tumbuh progresif dari kelima provinsi tersebut, namun untuk sektor yang bersamaan tumbuh progresif di seluruh lima provinsi hanyalah sektor Informasi dan Komunikasi.